

# LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN  
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN PATRANG

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Patrang Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Patrang disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Patrang ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Kecamatan Patrang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Patrang. Kinerja Kecamatan Patrang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Patrang Tahun 2024.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Patrang Tahun 2024.

Jember, Januari 2025

**CAMAT PATRANG**



**HENDRA KUSUMA, S.Sos**  
Pembina  
NIP. 19730206 200312 1 002

## DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	v
BAB. I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI .....	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA .....	6
E. SARANA PRASARANA.....	7
F. ANGGARAN .....	8
G. ISU STRATEGIS .....	11
H. PROFIL WILAYAH .....	12
BAB. II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	15
A. RENCANA STRATEGIS.....	15
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) .....	18
C. PERJANJIAN KINERJA.....	22
D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN .....	24
BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	27
A. KERANGKA KINERJA .....	27
B. CAPAIAN KINERJA .....	28
C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN .....	37
D. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA .....	57
E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN ....	59
F. REALISASI ANGGARAN .....	65
BAB. IV. PENUTUP .....	68

**LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026**
- Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024**
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024**
- Lampiran 4. SK IKU Tahun 2024**
- Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2024**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Patrang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Patrang tahun 2023 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Patrang Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Patrang Tahun 2024.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yaitu : (1). Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien, (2). Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Patrang tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran 1*      Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah mendapat predikat nilai **sangat tinggi**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran dengan capaian **sangat tinggi**.
- Sasaran 2*      Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan mendapat predikat nilai **sangat Tinggi**. Hal ini dapat di lihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran dengan capaian **sangat tinggi**.
- Sasaran 3*      Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan Masyarakat Kecamatan mendapat predikat nilai **sangat tinggi**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian **sangat tinggi**.

- Sasaran 4* Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat di Kecamatan mendapat predikat nilai **sangat tinggi**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian **sangat tinggi**.
- Sasaran 5* Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif dan efisien mendapat predikat **baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran dengan capaian **baik**.
- Sasaran 6* Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik mendapat predikat **sangat tinggi**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran dengan capaian **sangat baik**.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Patrang telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 5 (lima) indikator capaian dalam kategori **sangat baik**, 1 (satu) indikator capaian dalam kategori **baik**. Melakukan perencanaan yang matang guna melaksanakan pengelolaan keuangan dan mengetahui kebutuhan asset, melaksanakan penguatan pengawasan dan pengendalian internal, mematuhi peraturan perundang – undangan merupakan permasalahan yang perlu dirumuskan upaya dan solusi alternatif dalam rangka pengukuran kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 dilaksanakan 4 (empat) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan Belanja Operasional sebesar Rp. 16.587.333.260,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 293.325.100,-.

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024, belanja operasional **Rp. 14.449.171.303,-** atau 87,11% dari pagu belanja operasional dan belanja modal **Rp. 289.230.000,-** atau 98,60% dari pagu belanja modal. Total realisasi anggaran sebesar **Rp. 14.738.401.303,-** atau 87,11% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024, yang disampaikan merupakan data sementara dan belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. Dari analisis yang dilakukan tidak ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 antara lain:

1. Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi masih kurang memadai dan harus dipelihara secara rutin/berkala dan pengadaan baru agardapat mendukung kinerja tetap optimal;
2. Peningkatan dan pengembangan kompetensi khusus/keahlian khusus pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Selain itu tenaga pendukung di bidang administrasi/kesekretariatan masih kurang memadai dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan;

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Memelihara dan memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada untuk kelancaran tugas pokok dan fungsi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Patrang;
2. Agar lebih memperhatikan Aparat atau Sumber Daya Manusia yang ada di level Kecamatan dengan memberi kesempatan yang lebih besar untuk mengikuti pendidikan formal sehingga bisa menghasilkan SDM yang profesional, bertanggungjawab dan mempunyai komitmen terhadap tugas yang diemban;

3. Pemasangan banner persyaratan pelayanan Dan Go Digital baik di Kecamatan maupun di Kelurahan;
4. Pemasangan maklumat pelayanan yang ditandatangani oleh seluruh pegawai Kecamatan Patrang;
5. Mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi operator teknologi informatika perangkat daerah di Kabupaten Jember;
6. Perlu adanya Sinkronisasi dan Koordinasi yang lebih baik dan intensif dari tingkat atas maupun dari sektor lainnya sehingga dapat membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain untuk mempermudah pengkoordinasian.

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja Kecamatan Patrang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Patrang tahun 2024

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Patrang dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai

dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Patrang adalah

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Patrang;
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

## **C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN PATRANG**

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Patrang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 sebagai berikut :

- (1) Kecamatan Patrang merupakan unsur unsur pelaksana kewilayahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Kecamatan Patrang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(3) Kecamatan Patrang mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/kelurahan;
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

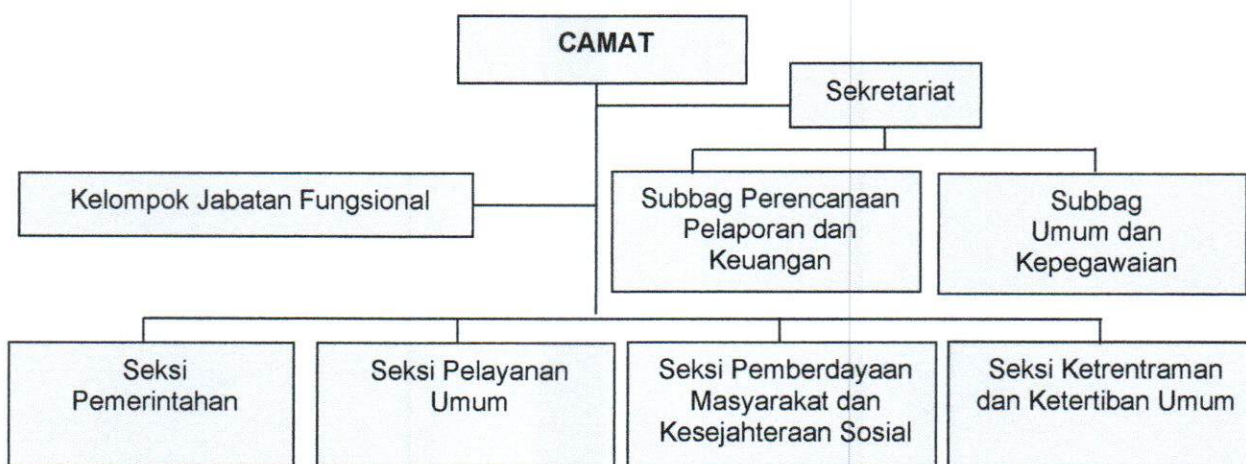
(4) Kecamatan Patrang dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Penanganan konflik sosial;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar propinsi dan daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;

- e. Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. Pelaksanaan Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
- i. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan Lembaga kemasyarakatan desa;
- j. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan Kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- m. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Pelayanan Terpadu Kecamatan;
- p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan

- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan bupati.
- (5) Susunan organisasi Kecamatan Patrang terdiri dari :
- a. Camat;
  - b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian:
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Pelayanan Umum;
  - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
  - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER  
PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2021  
TANGGAL 08 MARET 2021**



#### D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN PATRANG

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Patrang yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Kecamatan Patrang yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 119 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 125 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 6 orang atau 5%.

Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pegawai Kecamatan Patrang Tahun 2024**

Jabatan	Kebutuhan					Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
	Σ	SMA	D3	S1	S2	Σ	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Administrasi													
1. Administrator	2			2		1				1		1	
2. Pengawas	46	2		44		37		2	1	31	3	24	13
3. Pelaksana	77	41	13	13		27	2	17	2	4	-	8	19
Jabatan Fungsional													
Non ASN						54	10	35	3	6	-	10	44
Jumlah	125	43	13	59		119	12	54	6	42	3	43	76

**Sumber :** Data Kepegawaian Kecamatan Patrang Tahun 2024

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Patrang belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Kecamatan Patrang

#### E. SARANA PRASARANA KECAMATAN PATRANG

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi Kecamatan Patrang menempati gedung di Jalan Srikoyo Nomor 100, Patrang, Jember.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka Gedung Kecamatan Patrang Cukup memadai, karena kondisi Gedung yang cukup terawat. Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Patrang adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Patrang**  
**Per 31 Desember 2024**

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	2	3	4	5
1	Tanah Bangunan Gedung	34 unit	Baik : 20 unit Rusak Ringan : 10 Rusak Berat : 4	34 unit
2	Tanah Untuk Jalan	166 unit	Baik : 166 unit Rusak Ringan : - Rusak Berat : -	166 unit

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	2	3	4	5
3	Peralatan dan Mesin (AC, Mobil, Sepeda Motor, PC, Laptop, Printer, Scanner, Mesin FC, Audio Studio dll)	1.726 unit	Baik : 1526 Rusak Ringan : 98 Rusak Berat : 102	1.865 unit
4	Gedung dan Bangunan	53 unit	Baik : 42 Rusak Ringan : 9 Rusak Berat : 2	53 unit
5	Jalan, Jaringan dan Irigasi	203 paket	Baik : 44 Rusak Ringan : Rusak Berat :	203 paket
6	Aset tetap lainnya (Buku, Piala, Lukisan dll)	55 unit	Baik : 20 Rusak Ringan : 20 Rusak Berat : 10	55 unit
<b>Jumlah</b>		<b>2.237</b>		<b>2.367</b>

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Patrang Tahun 2024

## F. ANGGARAN KECAMATAN PATRANG

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Patrang pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Patrang memiliki 4 Program, 10 Kegiatan, dan 20 Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.880.658.360,- sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 1.3**  
**Anggaran Kecamatan Patrang**  
**Tahun 2024**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
1	2	3
<b>1</b>	<b>Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rp. <b>13.102.229.372,-</b>
1.1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp. 7.392.000,-
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 4.356.000,-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 3.036.000,-
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp. 10.708.923.612,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Rp. 10.566.951.612,-
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 141.972.000,-
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 41.250.000,-
	Sub. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 41.250.000,-
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Rp. 627.742.700,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 327.576.300,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 230.871.900,-
	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 22.600.500,-
	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 46.694.000,-
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.532.963.760,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 160.889.760,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 1.372.074.000,-

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
1	2	3
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ursan Pemerintahan Daerah	Rp. 183.957.300,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 35.000.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 77.068.800,-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 40.000.000,-
<b>2</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>Rp. 2.209.547.000,-</b>
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 2.178.6063.000,-
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 2.178.603.000,-
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp. 30.944.000,-
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 30.944.000,-
<b>3</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>Rp. 1.246.070.000,-</b>
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp. 1.246.070.000,-
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp. 28.370.000,-
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Rp. 1.217.700.000,-
<b>4</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>Rp. 322.811.988,-</b>

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
1	2	3
4.1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 322.811.988,-
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp. 322.811.988,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 16.880.658.360,-</b>

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Patrang Tahun 2024

## G. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Kecamatan Patrang dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Kecamatan Patrang dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Belum Optimalnya Kinerja Pemerintahan di Kecamatan;
2. Timbulnya potensi Kondusifitas wilayah/ masyarakat yang tidak stabil utamanya dalam menghadapi Pemilihan Umum Presiden, Pemilihan Umum Calon anggota Legislatif, Pemilihan Umum Kepala Daerah provinsi/Kabupaten;
3. Belum optimalnya profesionalisme petugas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

4. Pelayanan Masyarakat di Kecamatan belum maksimal berdampak pada Keterbatasan Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan;
5. Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

#### **H. PROFIL WILAYAH KECAMATAN**

Kecamatan Patrang merupakan bagian dari Kabupaten Jember yang terletak 0-5 km<sup>2</sup> ke arah Barat dari pusat Pemerintahan Jember. Berbentuk dataran tinggi yang dikelilingi perbukitan di sebelah timur. Kecamatan Patrang memiliki luas 54.288.866 m<sup>2</sup> dan berada di ketinggian 25-500 mdpl. Dengan batas – batas sebagai berikut :

- wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Arjasa, Kecamatan Sukorambi dan Kecamatan Pakusari;
- wilayah sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sumpalsari dan Kecamatan Pakusari;
- wilayah sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kaliwates, dan
- wilayah sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sukorambi dan Kecamatan Kaliwates.

Secara administratif Kecamatan Patrang membawahi 8 (delapan) Kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Banjarsengon;
2. Kelurahan Baratan;
3. Kelurahan Bintoro;
4. Kelurahan Gebang;
5. Kelurahan Jember Lor;
6. Kelurahan Jumerto;
7. Kelurahan Patrang;
8. Kelurahan Slawu

Kelurahan terluas adalah Kelurahan Bintoro dengan Persentase 28,63% dari luas wilayah Kecamatan Patrang, Kelurahan terkecil adalah Kelurahan Jumerto dengan persentase 11,96% dari luas wilayah Kecamatan Patrang.

Penduduk Kecamatan Patrang tersebar di delapan kelurahan. Berdasarkan jumlah penduduk yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk jumlah penduduk di Kecamatan Patrang Tahun 2024 Semester ke 1 sebanyak 103.340 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 51.164 jiwa atau 49,5% dan penduduk perempuan sebanyak 52.052 jiwa atau 50,5%.

Jumlah Penduduk Kecamatan Patrang menurut Pekerjaan, yaitu :

1. Aparatur/Pejabat Negara sebanyak 3.112 jiwa atau 3,01%;
2. Tenaga Pengajar sebanyak 1.304 jiwa atau 1,26%
3. Wiraswasta sebanyak 30.031 jiwa atau 29,06%
4. Pertanian/peternakan sebanyak 5.401 jiwa atau 5,23%
5. Nelayan sebanyak 16 jiwa atau 0,02%
6. Agama dan Kepercayaan sebanyak 68 jiwa atau 0,07%
7. Pelajar/Mahasiswa sebanyak 10.819 jiwa atau 10,47%
8. Tenaga Kesehatan sebanyak 345 jiwa atau 0,33%
9. Pensiunan sebanyak 1.340 jiwa atau 1,30%
10. Belum/tidak bekerja sebanyak 30.896 jiwa atau 29,90%
11. Lainnya sebanyak 20.008 jiwa atau 19,36%

*Sumber Data : Buku Data Agregat Semester ke 1 2024, Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember*

Kecamatan Patrang secara geografis memiliki Potensi kejadian bencana alam antara lain angin puyuh/puting beliung, kekeringan, banjir, longsor, pohon tumbang, dan kebakaran.

Ada beberapa Kelurahan yang mempunyai wisata yang terus dikembangkan guna menjadi obyek kunjungan wisata, antara lain :

- Kelurahan Baratan : Green Hill dan Baratan Hill;
- Kelurahan Bintoro : Bukit Merah Putih;
- Kelurahan Gebang : Cempaka Water Boom dan Wisata Religi PP Al Qodiri;
- Kelurahan Jember Lor : Alun – Alun Kota, Pendopo Wahyu Wibhawa  
Graha, Wisata Religi Masjid Al Baitul Amin;
- Kelurahan Jumerto : Wisata Rafting, Palaga Jumerto;
- Kelurahan Slawu : Wisata Air Terjun Antrokan.

Dalam upaya mendukung serta mengoptimalkan potensi obyek wisata, sarana Prasarana penunjang memiliki peranan penting dalam perekonomian Kecamatan Patrang salah satunya adalah transportasi khususnya untuk transportasi darat. Mayoritas kondisi jalan sebagian besar telah beraspal/beton dan dengan ruas jalan yang cukup luas. Kendaraan roda dua maupun empat pun dapat lalu lalang dengan mudah baik akses menuju masing-masing kelurahan maupun antar kecamatan, tetapi ada 2 kelurahan yang tidak memiliki akses angkutan umum yaitu Jumerto dan Banjarsengon. Kantor Pos yang tersedia di Kecamatan Patrang ada 3 yaitu di kelurahan Gebang, Kelurahan Jember Lor dan Kelurahan Patrang hingga saat ini masih aktif dan beroperasi. tidak hanya kantor pos saja yang tersedia, perusahaan/Agen jasa ekspedisi swasta juga terdapat di 5 kelurahan saja, yaitu di kelurahan Gebang, Kelurahan Jember Lor, Kelurahan Patrang, Kelurahan Bintoro dan Kelurahan Slawu. Jumlah Menara Telepon seluler dan Operator Layanan Komunikasi Telepon di Kecamatan Patrang masing-masing sebanyak 26 menara dan 39 operator seluler yang ada di Kecamatan Patrang.

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Kecamatan Patrang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember nomor 99 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Jember pada periode 2021-2026 yaitu: "Sudah waktunya membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akeselerasi dalam membangun Jember." Yang selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai *cascade* kinerja, Kecamatan Patrang Misi, tujuan dan sasaran daerah yang di dukung Kecamatan Patrang yaitu

Misi : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya

Tujuan :

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Melalui Sinergi, dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran RPJMD :

- a. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan efisien.
- b. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Perbaikan Rencana Strategis Kecamatan dilakukan pada tahun 2023, yaitu pada perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang dituangkan dalam Dokumen Kertas Kerja TC.25 (Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah), sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Patrang adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Patrang**  
**Tahun 2021-2026**

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien

Indikator Tujuan 1 : Nilai SAKIP OPD

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai		100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Rencana Strategis Kecamatan Patrang tahun 2021-2026

Tujuan 2 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Indikator Tujuan 2 : Ketersediaan dokumen penataan organisasi dan tata laksana Pemerintah Daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		80	80	80	85	85

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase fasilitas kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan		80%	80%	80%	85%	90%
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman masyarakat		80%	90%	100%	100%	100%

Sumber : Rencana Strategis Kecamatan Patrang tahun 2021-2026

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel 2. 2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p><b>Penjelasan Indikator :</b> Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen LAKIP</li> <li>• Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK dan peta jabatan)</li> <li>• Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja</li> <li>• Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis)</li> </ul>	Camat	Data penataan organisasi , kinerja pelayanan publik dan tata laksana
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p><b>Penjelasan Indikator :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik</li> <li>2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)</li> <li>3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seksi Pemerintahan</li> <li>- Seksi Pelayanan Umum</li> <li>- Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial</li> <li>- Seksi</li> </ul>	SUKMA-E

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian persyaratan</li> <li>• Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan</li> <li>• Waktu penyelesaian</li> <li>• Biaya / tarif</li> <li>• Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan</li> <li>• Kompetensi pelaksana</li> <li>• Perilaku pelaksana</li> <li>• Penanganan pengaduan , saran dan masukan</li> <li>• Kualitas sarana dan prasarana</li> </ul>	Ketentraman dan Ketertiban Umum	
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p><b>Formulasi Kegiatan :</b> Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi _____ x 100%</p> <p>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan</p> <p><b>Penjelasan Indikator :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat</li> </ul>	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b>            Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.  <math>\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%</math></p> <p><b>Penjelasan indikator :</b>            - Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Laporan ataupun media sosial kecamatan.</p>	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	<p><b>Penjelasan Indikator :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember</li> <li>2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember</li> </ol>	- Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p><b>Formulasi perhitungan:</b>            Jumlah indikator program yang tercapai.  <math>\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%</math></p> <p><b>Penjelasan indikator:</b>            Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekretaris Camat	LAKIP

Sumber : Keputusan Camat Patrang no 065/09/02/35.09.02/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai PermenPANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD kedalam Perjanjian Kinerja PD tahun 2024.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Patrang Tahun 2024 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Kecamatan Patrang**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024
1.	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Prosentase indikator program yang tercapai	100%
2.	Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan public yang merata dan berkualitas di kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	80
3.	Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan Masyarakat kecamatan	Persentase fasilitasi kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	80%
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman masyarakat	100%
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP OPD	A (81)
6.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah	4 dok

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Patrang tahun 2024

Program	Anggaran	Sumber Dana
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.102.229.372,-	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 2.209.547.000,-	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 1.246.070.000,-	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 322.811.988,-	APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 16.880.658.360,-</b>	

#### **D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024**

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Patrang terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

a) **Sasaran Strategis I :**

Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

Didukung oleh :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 11.049.657.272,-

Keseluruhan anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sejumlah Rp. 13.102.229.372,- yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 65,44% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Patrang.

b) **Sasaran Strategis II :**

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

Didukung oleh :

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan anggaran Rp. 2.209.547.000,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 2.209.547.000,- yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 13,09% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Patrang.

c) **Sasaran Strategis III :**

Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan

Didukung oleh :

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan anggaran Rp. 1.246.070.000,-

Keseluruhan anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sejumlah Rp. 1.246.070.000,- yang dialokasikan untuk sasaran III adalah sebesar 7,38% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Patrang.

d) Sasaran Strategis IV :

Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan  
Didukung oleh :

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran Rp. 322.811.988,-

Keseluruhan anggaran Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sejumlah Rp. 322.811.988,- yang dialokasikan untuk sasaran IV adalah sebesar 1,91% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Patrang.

e) Sasaran Strategis V :

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional, Efektif dan Efisien

Didukung oleh :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 534.134.100,-

Keseluruhan anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sejumlah Rp. 13.102.229.372,- yang dialokasikan untuk sasaran V adalah sebesar 3,16% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Patrang.

f) Sasaran Strategis VI :

Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Didukung oleh :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 1.521.438.000,-

Keseluruhan anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sejumlah Rp. 13.102.229.372,- yang dialokasikan untuk sasaran VI adalah sebesar 9,01% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Patrang.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Patrang dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Kecamatan Patrang menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$\geq 90$	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :

- a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN PATRANG

Kecamatan Patrang telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Patrang tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Patrang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai.

Tabel 3.2  
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran/tujuan Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 = (5/4 *100%)	7	8 = (5/7 *100%)
1.	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan public yang merata dan berkualitas di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	87,5	109%	85	103%
3.	Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan Masyarakat kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	80%	80%	100%	90%	89%
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP OPD	A (81)	BB (71,13)	88%	A (83)	89%

No	Sasaran/tujuan Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 = (5/4 *100%)	7	8 = (5/7 *100%)
6.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 dok	4 dok	100%	4 dok	100%

Sumber Data Realisasi : Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Patrang

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian (jumlah) 6 indikator sasaran Kecamatan Patrang rata rata mencapai 99.5% dan masuk dalam kategori sangat tinggi Dan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, realisasi tahun 2024 menunjukkan progres positif Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Patrang telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Kewilayahan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Patrang tahun 2021 -2026.

Perhitungan data realisasi per sasaran adalah sebagai berikut :

**Realisasi Sasaran 1 :**

Berdasarkan data realisasi program Kecamatan Patrang tahun 2024

$$\text{Persentase Indikator program yang tercapai} = \frac{4 \text{ indikator program yang tercapai}}{4 \text{ indikator program}} \times 100\% = 100\%$$

Angka realisasi ini telah mencapai target tahun 2024

**Realisasi Sasaran 2 :**

Berdasarkan data SKM yang ditarik dari SUKMA Jatim pada akun Kecamatan Patrang per 31 Desember 2024, didapatkan IKM sebesar 87,5, dimana IKM tersebut melebihi target IKM di tahun 2024.

### Realisasi sasaran 3 :

Berdasarkan data pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan masyarakat , maka realisasi indikator sasaran 3 adalah sebagai berikut :

$$\begin{array}{l} \text{Persentase fasilitasi} \\ \text{kesejahteraan} \\ \text{Masyarakat yang} \\ \text{dilaksanakan} \end{array} = \frac{24 \text{ kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan}}{24 \text{ Kegiatan fasilitasi yang direncanakan}} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan

Kegiatan kegiatan Fasilitasi kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan di tahun 2024 antara lain:

1. Peningkatan kapasitas kader PKK yang dilaksanakan oleh TP PKK Kecamatan Patrang berupa pelatihan keprotokolan dan pelatihan membuat bunga dari pita satin dan merangkai menjadi buket, peningkatan kapasitas kader PKK juga dilaksanakan oleh 5 TP PKK Kelurahan;
2. Kegiatan pengembangan UMKM dilaksanakan oleh 8 kelurahan berupa pelatihan bagi pelaku usaha UMKM, bazaar;
3. Kegiatan pelayanan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh 8 kelurahan berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita Stunting, balita underweight dan wasting, Ibu hamil kurang energi kronis (KEK);
4. Pembagian bantuan pangan berupa beras, telur ayam, daging ayam dari Pemerintah Pusat melalui Kantor Pos Kabupaten Jember yang di laksanakan di 8 Kelurahan setiap 3 bulan;
5. Fasilitasi penyaluran bantuan social program keluarga harapan (PKH) plus;
6. Peningkatan kapasitas kader Bina Keluarga Lansia (BKL) Kecamatan Patrang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Patrang;
7. Peningkatan Kapasitas kelompok Bina Keluarga remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA);

8. Pendampingan ibu balita dalam rangka peningkatan berat badan dan tumbuh kembang balita;
9. Program wilayah binaan pemberdayaan kader posyandu remaja dalam upaya penurunan stunting di Kelurahan Baratan;
10. Pelaksanaan mini lokakarya setiap 3 bulan bersama puskesmas patrang, puskesmas banjarsengon dan Balai Penyuluh KB Kecamatan Patrang;
11. Gerakan Gemar Makan Ikan Jember Sehat Bebas Stunting bersama HIMPAUDI Kecamatan Patrang;
12. Pembinaan Kader Institut Masyarakat Pedesaan (IMP) atau disebut juga tenaga lini lapangan;
13. Fasilitasi Gerakan edukasi dan pembagian makanan bergizi untuk siswa SDN Jumerto 1, Kelurahan Jumerto;
14. Pelaksanaan Rembug Stunting di 8 Kelurahan se wilayah Kecamatan Patrang.

**Realisasi sasaran 4 :**

Berdasarkan data laporan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat kecamatan Patrang tahun 2024 , maka realisasi indikator sasaran 4 sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase penyelesaian laporan pelanggaran trantibum yang dilaksanakan} \\ = \frac{5 \text{ laporan yang diselesaikan}}{5 \text{ laporan pelanggaran yang masuk}} \times 100\% = 100\% \end{array}$$

Seluruh laporan pelanggaran telah terselesaikan dengan baik, sesuai ketentuan dan SOP yang ada, laporan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Patrang pada tahun 2024 antara lain:

1. Patroli dalam rangka menindaklanjuti Laporan kegiatan balap liar jalan Slamet Riyadi, Baratan, Kecamatan Patrang;

2. Menindaklanjuti laporan Masyarakat terkait warga yang minum minuman keras/beralkohol di Kelurahan Jember Lor dan Kelurahan Gebang yang dilakukan bersama 3 Pilar;
3. Memperkuat system keamanan lingkungan melalui siskamling di wilayah Kecamatan Patrang;
4. Pembinaan terhadap anak sekolah pada waktu jam pelajaran berada di warung dan tempat penyewaan game/playstation di 8 Kelurahan;
5. Sidak dalam rangka mengantisipasi penyalahgunaan tempat kost di wilayah Kecamatan Patrang.

**Realisasi Sasaran 5 :**

Berdasarkan Surat dari Inspektur Inspektorat Kabupaten Jember nomor 700/38/Ev.AKIP/35.09.410/2024 tanggal 27 Mei 2024 Perihal hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2024, Kecamatan menunjukkan kategori peringkat BB (sangat baik) Akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal dengan nilai 71,13.

**Realisasi Sasaran 6 :**

Berdasarkan ketersediaan dokumen penataan organisasi dan tata laksana Pemerintahan Daerah seperti LKIP, Dokumen Anjab, Dokumen Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja, Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP telah terpenuhi sesuai dengan target.

Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun tahun sebelumnya dapat di lihat pada tabel.

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya**

Sasaran /Tujuan Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	-	100%	100%	100%
2. Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan public yang merata dan berkualitas di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	82	80	87.5
3. Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan Masyarakat kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	-	100%	80%	80%
4. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	-	85%	90%	100%
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP OPD	-	-	B (61)	B (71,13)
6. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	-	4 dok	4 dok	4 dok

Sumber Data Realisasi : Seluruh sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan trend peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan trend peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2023 dan 2024.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan Masyarakat kecamatan

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan trend realisasi yang mengalami penurunan sejak kurun waktu tahun 2022 s.d 2024.

Sasaran Strategis 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan trend peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif dan efisien

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan trend peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2023 dan 2024

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan trend realisasi yang tetap sejak kurun waktu tahun 2022 dan 2024.

Tabel 3.4

(Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Patrang dengan Realisasi Nasional/ Regional Jawa Timur/ Realisasi Kabupaten)

No	Sasaran/tujuan Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	Realisasi Nasional/Regional Jawa Timur/Kabupaten	Ket (+/-)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	-	-
2.	Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan public yang merata dan berkualitas di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87.5	87.33 (IKM Kab Jember)	-

3.	Meningkatnya fasilitas kesejahteraan Masyarakat kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	80%	-	-
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	-	-
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP OPD	BB (71,13)	62,50 (nilai SAKIP Kab. Jember)	-
6.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 dok	-	-

*Sumber Data: Data Realisasi Kinerja Kec. Patrang th 2024; SUKMA-e Kecamatan Patrang; Laporan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Jember Tahun 2024; LHE AKIP Kab. Jember th.2024*

Dari enam indikator Kecamatan Patrang, sebanyak empat indikator tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten atau realisasi Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama. Untuk indikator IKM, Realisasi IKM Kecamatan Patrang tahun 2024 lebih tinggi sebesar 0,17 poin dibandingkan dengan nilai IKM Kabupaten Jember tahun 2024. Dimana hasil tersebut menunjukkan pelayanan di Kecamatan Patrang cukup optimal dan mendukung kualitas pelayanan publik prima di Kabupaten Jember. Sedangkan untuk indikator Nilai evaluasi SAKIP Kecamatan Patrang tahun 2024 lebih tinggi 8,63 poin dibandingkan nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Jember.

### C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Tabel 3.5  
Program Pendukung Sasaran

Sasaran/tujuan Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
1	2	3	4	5
<b>Sasaran 1 :</b>	<b>Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.566.951.612,-	8.772.945.224,-	83,02%
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	41.250.000,-	39.675.000,-	96,18%
	<i>Administrasi Umum Perangkat daerah</i>			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	230.871.900,-	217.837.850,-	94,35%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.694.000,-	34.868.500,-	74,67%
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.889.760,-	152.023.536,-	94,49%
<b>Total</b>		<b>11.046.657.272,-</b>	<b>9.217.764.310,-</b>	<b>88,55%</b>
<b>Sasaran 2 :</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>			
	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.178.603.000,-	2.160.929.122,-	100,00%
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>			

Sasaran/tujuan Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
1	2	3	4	5
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.944.000	24.250.000,-	78,37%
<b>Total</b>		<b>2.209.547.000,-</b>	<b>2.185.179.122,-</b>	<b>98,90%</b>
<b>Sasaran 3 :</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>			
	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	28.370.000,-	23.030.000,-	81,18%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.217.700.000,-	1.142.722.000,-	93,84%
<b>Total</b>		<b>1.246.070.000,-</b>	<b>1.165.752.000,-</b>	<b>87,51%</b>
<b>Sasaran 4 :</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>			
	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	322.811.988,-	190.065.390,-	58,88%
<b>Total</b>		<b>322.811.988,-</b>	<b>190.065.390,-</b>	<b>58,88%</b>
<b>Sasaran 5 :</b>	<b>Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	327.576.300,-	322.788.200,-	98,54%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.600.500,-	16.488.900,-	72,96%
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			

Sasaran/tujuan Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
1	2	3	4	5
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000,-	31.789.000,-	90,83%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.068.800,-	57.991.971,-	75,25%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000,-	33.220.900,-	83,05%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.888.500,-	31.343.337,-	98,29%
<b>Total</b>		<b>534.134.100,-</b>	<b>493.622.308,-</b>	<b>86,49%</b>
<b>Sasaran 6 :</b>	<b>Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.356.000,-	4.340.000,-	99,63%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.036.000,-	3.000.000,-	98,81%
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	141.972.000,-	113.702.000,-	80,09%
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</i>			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.372.074.000,-	1.365.390.373,-	99,51%
<b>Total</b>		<b>1.521.438.000,-</b>	<b>1.486.432.373,-</b>	<b>94,51%</b>

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **Sasaran 1. Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah** adalah sebagai berikut :

Program : Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  
 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	10.566.951.612,-	8.772.945.224,-
Output	Jumlah orang	orang	100	76

Persentase serapan anggaran 83,03% dikarenakan perencanaan anggaran yang kurang tepat sehingga target anggaran terlalu tinggi, selain itu dikarenakan tidak adanya proses PAK maka tidak dapat menggeser anggaran untuk sub kegiatan lain.

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	41.250.000,-	39.675.000,-
Output	Jumlah paket	paket	3	3

Pengadaan pakaian dinas dilaksanakan untuk menunjang kegiatan – kegiatan pada Kecamatan Patrang, baik yang bersifat rutin maupun insidental seperti partisipasi pada kegiatan memperingati HUT RI tingkat Kabupaten.



Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	230.871.900,-	217.837.850,-
Output	Jumlah paket	paket	4	4

Pengadaan bahan logistik kantor bertujuan untuk menunjang dan mempermudah pelaksanaan tugas administrasi kantor. Dengan tersedianya bahan logistik kantor, diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja dan kelancaran kerja pegawai

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	46.694.000,-	34.868.500,-
Output	Jumlah laporan	laporan	12	12

Persentase serapan anggaran sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD masih belum memenuhi target yaitu 74,67%, hal ini disebabkan perencanaan yg kurang tepat. Adapun kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai, meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, mencapai sasaran yang tepat, melaksanakan pelayanan yang baik. Salah satu kegiatan nya adalah studi tiru pada Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya.



Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	160.889.760,-	152.023.536,-
Output	Jumlah laporan	laporan	12	12

Kegiatan ini dilaksanakan agar kebutuhan komunikasi, internet, Listrik, dan air terpenuhi untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan untuk memberikan Pelayanan yang baik.

Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **Sasaran 2. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan Publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan** adalah sebagai berikut :

Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik  
 Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan  
 Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	2.178.603.000,-	2.160.929.112,-
Output	Jumlah dokumen	dokumen	8	8

Tujuan sub kegiatan ini adalah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan antara lain dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah melalui pembinaan RT/RW yang diselenggarakan di tiap Kelurahan, menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.



Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan

Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	30.944.000,-	24.250.000,-
Output	Jumlah laporan	laporan	12	12

Guna mewujudkan pelayanan publik yang merata dan berkualitas, Kecamatan Patrang menyelenggarakan pelayanan Administrasi Kependudukan meliputi Pengantar KTP, Kartu Keluarga (KK), Pengantar Surat Pindah Domisili Penduduk antar Kecamatan, antar Kabupaten. Selain menyelenggarakan pelayanan Administrasi Kependudukan, Kecamatan Patrang juga menyelenggarakan pelayanan Surat Pengantar Nikah, Dispensasi Nikah, Akte Kelahiran, SKCK, KIS/BPJS, SKW, Legalisasi (Keterangan satu nama, Keterangan Domisili, Keterangan Usaha).

Salah satu kegiatan adalah melakukan perekaman e KTP on the Spot bagi Pemula yang dilakukan di 8 Kelurahan bersama dengan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Tujuannya memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan, terutama bagi pemula.





Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **Sasaran 3. Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan masyarakat Kecamatan** adalah sebagai berikut :

Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  
 Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  
 Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	28.370.000,-	23.030.000,-
Output	Jumlah lembaga kemasyarakatan	Lembaga Kemasyarakatan	9	9

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di kelurahan bertujuan untuk memastikan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, menumbuhkan kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan Kelurahan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting karena Pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal tanpa keterlibatan masyarakat



Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  
 Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	1.217.700.000,-	1.142.722.000,-
Output	Jumlah pokmas/ormas	Pokmas/ Ormas	9	9

Guna pemerataan pembangunan di seluruh kelurahan, pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat melalui kemandirian masyarakat, terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menganalisis kondisi, potensi, dan masalah yang perlu diatasi. Tahun 2024 Kecamatan Patrang memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan, yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana kelurahan, memberdayakan masyarakat di kelurahan, membiayai pelayanan sosial dasar yang meningkatkan kualitas hidup Masyarakat.

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan di Kecamatan Patrang adalah (1) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya antara lain peningkatan kapasitas Kader Posyandu/pelaksana Kesehatan, pemberian makanan tambahan (PMT) guna mempercepat penurunan angka stunting, (2) Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya antara lain Gebyar UMKM, Pekan Raya Jumerto yang didukung oleh UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Patrang, pelatihan bagi pelaku UMKM, pelatihan dasar bagi barista, pelatihan kewirausahaan.

Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **Sasaran 4. Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kelurahan** adalah sebagai berikut :

Program	:	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Kegiatan	:	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sub Kegiatan	:	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	322.811.988,-	190.065.390,-
Output	Jumlah laporan	Laporan	12	12

Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan dinamis, beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum yaitu melakukan Koordinasi antara aparat dan kepolisian, sosialisasi untuk meningkatkan keamanan lingkungan, himbauan untuk meningkatkan Siskamling, merumuskan kebijakan dan melaksanakan koordinasi terkait ketertiban umum, mengkoordinir penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat lintas sektoral, melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban Masyarakat, melakukan pengawasan penerapan peraturan daerah dan peraturan bupati.





Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **Sasaran 5. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional, Efektif dan Efisien** adalah sebagai berikut :

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  
 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	327.576.300,-	322.788.200,-
Output	Jumlah Paket	Paket	6	6

Guna menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai dapat membantu memperlancar dan mempermudah proses pelaksanaan aktivitas kantor, meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai, terlaksananya pelayanan yang baik, mempercepat penyelesaian tugas.

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

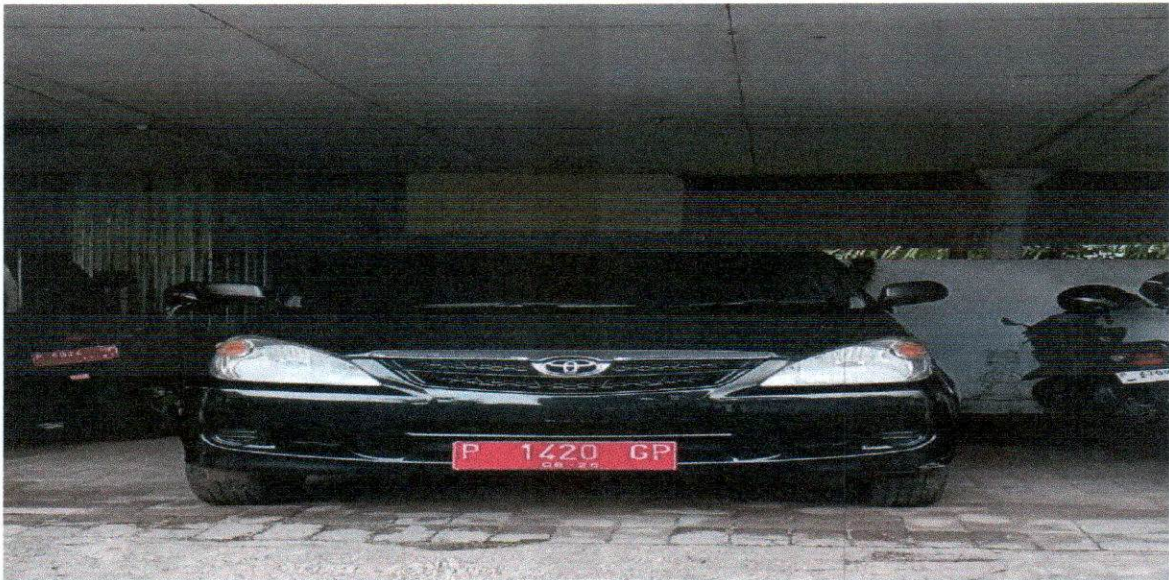
	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	22.600.500,-	16.488.900,-
Output	Jumlah Paket	Paket	2	2

Tujuan penyediaan barang cetak dan penggandaan untuk memenuhi kebutuhan sarana kantor sehingga meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai serta memastikan terlaksananya pelayanan yang baik.

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	35.000.000,-	31.789.000,-
Output	Jumlah Kendaraan	unit	1	1

Kendaraan dinas adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat yaitu Camat untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.



- Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	77.068.800,-	57.991.971,-
Output	Jumlah Kendaraan	unit	10	10

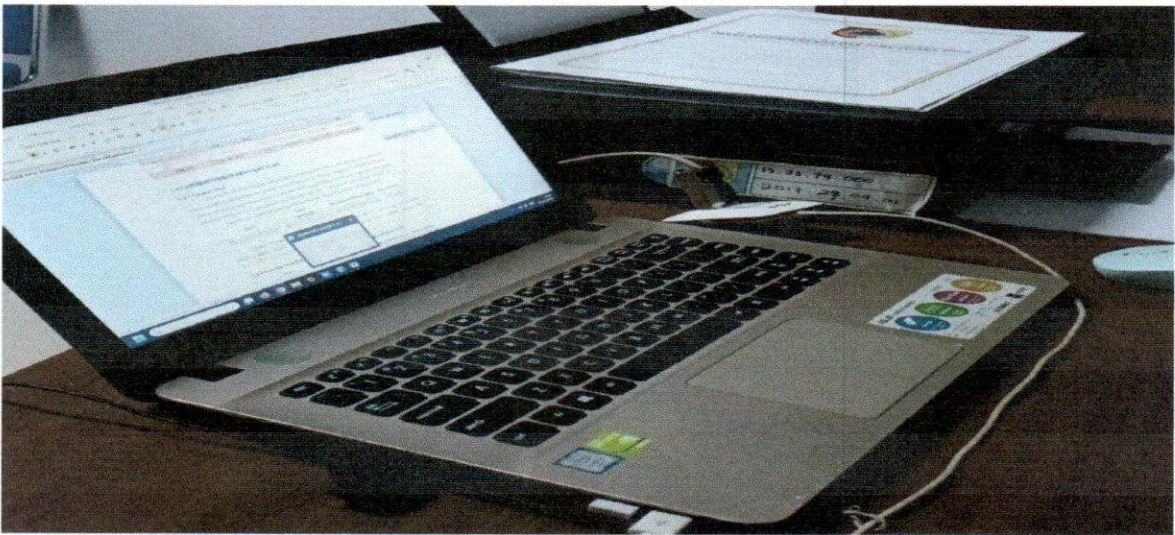
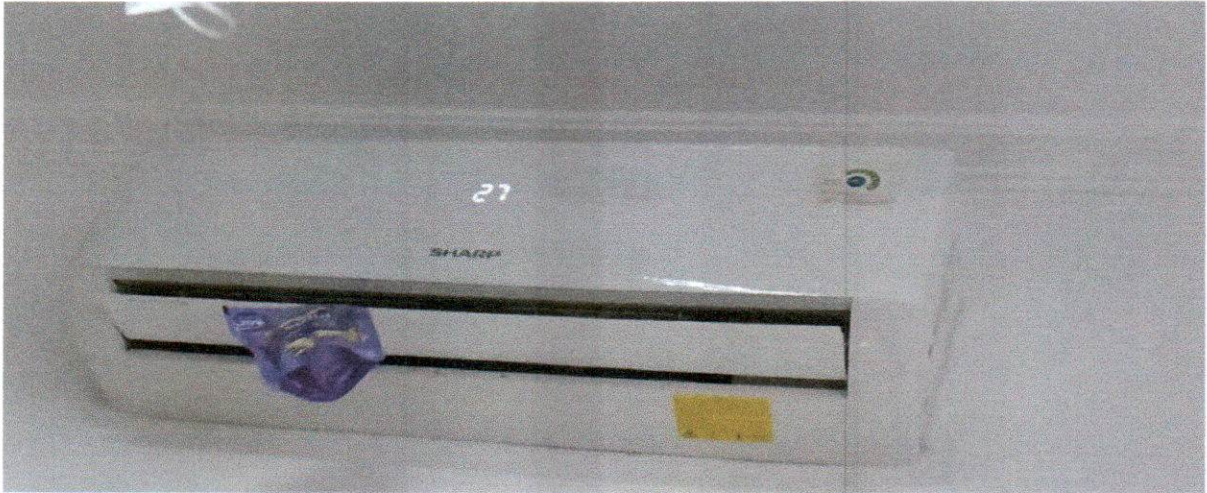
Tujuan kegiatan pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan operasional adalah untuk memastikan kendaraan dinas dapat dimanfaatkan secara maksimal dan terjaga kualitasnya. Pada Kecamatan Patrang terdapat 1 (satu) kendaraan operasional Satpol PP, 1 (satu) kendaraan roda 2 operasional Kecamatan dan 8 (delapan) kendaraan roda 2 operasional Kelurahan. Selain pemeliharaan termasuk didalamnya adalah pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan operasional.



Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	40.000.000,-	33.220.900,-
Output	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	unit	80	80

Tujuan kegiatan pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya untuk menjaga kondisi agar tetap baik guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai.



Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
 Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	40.000.000,-	33.220.900,-
Output	Jumlah Gedung	unit	9	9

Tujuan kegiatan pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya adalah untuk memulihkan dan meningkatkan kondisi fisik bangunan yang telah mengalami kerusakan atau penurunan kualitas, terwujudnya gedung kantor yang kondusif dan aman, terjaga dan terpeliharanya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai dapat membantu karyawan bekerja dengan semaksimal dan seefisien mungkin.



Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **Sasaran 6. Meningkatkan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah Dan Tata Laksana Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik** adalah sebagai berikut :

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  
 Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	4.356.000,-	4.340.000,-
Output	Jumlah Dokumen	Dokumen	3	3

Tujuan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah adalah untuk memastikan pembangunan daerah berjalan terarah, efisien, dan berorientasi pada hasil. Dokumen perencanaan perangkat daerah, seperti Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Strategis (Renstra).

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	3.036.000,-	3.000.000,-
Output	Jumlah laporan	Laporan	2	2

Maksud dan tujuan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD agar dapat tersusun laporan capaian kinerja dengan baik dan tepat waktu.

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	141.972.000,-	113.702.000,-
Output	Jumlah dokumen	Dokumen	4	4

Tujuan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD adalah untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	1.372.074.000,-	1.365.390.373,-
Output	Jumlah Laporan	Laporan	12	12

Tujuannya untuk memenuhi penyediaan jasa pelayanan umum kantor guna menunjang penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran pada Kantor Kecamatan Patrang.

#### D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumber Daya Manusia Kecamatan Patrang berjumlah 119 orang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 16.880.658.360,- melaksanakan 4 program, 10 kegiatan dan 20 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Kategori Efisiensi
1	2	3	4
1. Meningkatkan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	100%	88,55%	Efisien
2. Meningkatkan kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan	109%	88,78%	Efisien
3. Meningkatkan fasilitasi kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	100%	87,51%	Efisien
4. Terjaganya ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan	100%	58,88%	Efisien
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif dan efisien	88%	86,49%	Efisien
6. Meningkatkan penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	94,51%	Efisien

Sumber : data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2; data % serapan anggaran pada tabel 3.5

Capaian kinerja Sasaran 1: 100% dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 2: 109% dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 3: 100% dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 4: 100% dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 5: 88% dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 6: 100% dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

## E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Analisis capaian kinerja Kecamatan Patrang menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab (keberhasilan / kegagalan) capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.7  
Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	2	3	4	5	6	7
<b>Sasaran 1.</b> Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah						
Indikator 1.1	100%	√				
Indikator 1.2						
Rata rata capaian	100%	√				
<b>Sasaran 2.</b> Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan						
Indikator 1.1	109%	√				
Indikator 1.2						

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	2	3	4	5	6	7
Rata rata capaian	109%	√				
<b>Sasaran 3.</b> Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan Masyarakat Kecamatan						
Indikator 1.1	100%	√				
Indikator 1.2						
Rata rata capaian	100%	√				
<b>Sasaran 4.</b> Terjaganya ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan						
Indikator 1.1	100%	√				
Indikator 1.2						
Rata rata capaian	100%	√				
<b>Sasaran 5.</b> Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif dan efisien						
Indikator 1.1	88%		√			
Indikator 1.2						
Rata rata capaian	88%		√			
<b>Sasaran 6.</b> Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik						
Indikator 1.1	100%	√				
Indikator 1.2						
Rata rata capaian	100%	√				

Sumber : tabel 3.2 – 3.4 LKIP tahun 2024

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran strategis 1 mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100 %, beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain :

- Faktor pendorong keberhasilan antara lain kerja sama dan koordinasi yang baik juga tata kelola yang baik dan sesuai standar yang ditetapkan;
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah menentukan target yang realistis, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, membekali pegawai dengan pengembangan keterampilan, membangun system komunikasi yang baik dalam melaksanakan tugas;
- Rencana perbaikan kedepan yaitu dengan menyempurnakan dokumen perencanaan, melaksanakan monitoring terhadap pencapaian target indikator kinerja;
- Inovasi dan/atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain meningkatkan proses kesepakatan bersama dalam memecahkan masalah yang melibatkan penyatuan sudut pandang yang berbeda di antara berbagai pihak sehingga mampu menghasilkan visi untuk pencapaian tujuan.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran strategis 2 mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 109%, beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain :

- Faktor pendorong keberhasilan antara lain kesadaran melayani Masyarakat, pegawai yang semangat dalam melayani, menyelenggarakan rapat evaluasi secara berkala untuk mengevaluasi pelayanan yang diberikan, pegawai terampil dalam melayani, sarana dan prasarana yang mendukung, menerapkan standar pelayanan;

- Solusi terhadap kendala kedepan adalah mempercepat waktu penyelesaian, memperpendek prosedur pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan, melengkapi sarana dan prasarana pelayanan, meningkatkan kompetensi petugas pelayanan;
- Rencana perbaikan kedepan yaitu dengan mengidentifikasi apa saja permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat, meningkatkan kompetensi petugas pelayanan, penanganan pengaduan dengan cepat;
- Inovasi dan/atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain melakukan kolaborasi dengan komunitas dengan cara bertukar informasi dan mengubah layanan atau kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan Masyarakat Kecamatan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran strategis 3 mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 109%, beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain :

- Faktor pendorong keberhasilan antara lain koordinasi yang baik dalam pelaksanaan fasilitasi, kualitas pelayanan yang baik;
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah meningkatkan akses terhadap kegiatan fasilitasi, mengoptimalkan pemberdayaan Masyarakat, meningkatkan kapasitas aparatur dalam melaksanakan fasilitasi;
- Rencana perbaikan kedepan yaitu dengan pengembangan Sumber Daya Manusia, pengembangan kelembagaan kelompok, penyediaan informasi tepat guna,;
- Inovasi dan/atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain melakukan pendekatan partisipatif, penerapan teknologi, pelatihan ketrampilan.

**Sasaran Strategis 4 : Terjaganya Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kecamatan**

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran strategis 4 mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100%, beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain :

- Faktor pendorong keberhasilan antara lain tanggungjawab bersama dalam setiap upaya memelihara ketertiban dan ketentraman di Masyarakat;
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah penegakan hukum untuk menjaga ketertiban dan ketentraman Masyarakat, melakukan pengawasan serta penyuluhan kepada masyarakat;
- Rencana perbaikan kedepan yaitu dengan meningkatkan kapasitas aparatur, meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam berperan serta menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan di sekitarnya, meningkatkan intensitas pelaksanaan siskamling;
- Inovasi dan/atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam menjaga ketertiban dan ketentraman Masyarakat, melakukan system pengawasan dan pemantauan yang baik.

**Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif dan efisien**

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran strategis 5 mencapai predikat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 88%, beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain :

- Faktor pendorong keberhasilan antara lain pengelolaan keuangan dan aset yang tertib, tata perundang – undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab;
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah meningkatkan kualitas data, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, bimbingan teknis, diklat;

- Rencana perbaikan kedepan yaitu melakukan perencanaan yang matang guna melaksanakan pengelolaan keuangan dan mengetahui kebutuhan asset, melaksanakan penguatan pengawasan dan pengendalian internal, mematuhi peraturan perundang - undangan;
- Inovasi dan/atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain berkolaborasi dengan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terkait penggunaan teknologi informasi keuangan daerah yang mudah di akses oleh Masyarakat sehingga pengelolaan keuangan dan set dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran strategis 6 mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100%, beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain :

- Faktor pendorong keberhasilan antara lain partisipasi Masyarakat dapat membantu pemerintah untuk lebih memahami kebutuhan dan harapan masyarakat, reformasi birokrasi dapat membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, dinamis dan mampu menjawab kebutuhan Masyarakat, standar pelayanan publik dapat memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat, motivasi dan kompetensi pegawai membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik, lingkungan yang kondusif membantu meningkatkan system penyampaian layanan;
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah memperpendek prosedur pelayanan, mempercepat waktu pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan, sarana, prasarana dan sumber daya manusia;

- Rencana perbaikan kedepan yaitu meningkatkan manajemen perubahan untuk menciptakan budaya kerja positif, menguatkan kelembagaan, tata laksana, peraturan perundang-undangan, system manajemen SDM Aparatur, system pengawasan dan akuntabilitas kerja;
- Inovasi dan/atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain meningkatkan kualitas pelayanan publik, membangun budaya kerja, mendukung program prioritas nasional.

## F. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Patrang pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 16.880.658.360,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 16.587.333.260,- terealisasi sebesar Rp. 14.449.171.303,- (87,11%)
2. Belanja Modal sebesar Rp. 293.325.100,- terealisasi sebesar Rp. 289.230.000,- (98,60%)

**Tabel 3.8**  
**Realisasi Anggaran Kecamatan Patrang Tahun 2024**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
1	2	3	4	5
1	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 12.808.904.272,-	Rp. 10.908.588.991,-	85,16%
1.1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp. 7.392.000,-	Rp. 7.340.000,-	99,30%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 4.356.000,-	Rp. 4.340.000,-	99,63%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 3.036.000,-	Rp. 3.000.000,-	98,81%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp. 10.708.923.612,-	Rp. 8.886.647.224,-	82,98%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 10.566.951.612,-	Rp. 8.772.945.224,-	83,02%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
1	2	3	4	5
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 141.972.000,-	Rp. 113.702.000,-	80,09%
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 41.250.000,-	Rp. 39.675.000,-	96,18%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 41.250.000,-	Rp. 39.675.000,-	96,18%
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 627.742.600,-	Rp. 591.983.450,-	94,30%
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Rp. 327.576.100,-	Rp. 322.788.200,-	98,54%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantort	Rp. 230.871.900,-	Rp. 217.837.850,-	94,35%
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Rp. 22.600.500,-	Rp. 16.488.900,-	72,96%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 46.694.000,-	Rp. 34.868.500,-	74,67%
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.532.963.760,-	Rp. 1.517.413.909,-	98,99%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 160.889.760,-	Rp. 152.023.536,-	94,49%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 1.372.074.000,-	Rp. 1.365.390.373,-	99,51%
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 183.957.300,-	Rp. 154.345.208,-	83,90%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 35.000.000,-	Rp. 31.789.000,-	90,38%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 77.068.800,-	Rp. 57.991.971,-	75,25%
	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Rp. 40.000.000,-	Rp. 33.220.900,-	83,05%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 31.888.500,-	Rp. 31.343.337,-	98,29%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 2.209.547.000,-	Rp. 2.185.179.122,-	98,90%
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Rp. 2.178.603.000,-	Rp. 2.160.941.842,-	99,19%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
1	2	3	4	5
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 2.178.603.000,-	Rp. 2.160.929.122,-	99,19%
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Rp. 30.944.000,-	Rp. 24.250.000,-	78,37%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Rp. 30.944.000,-	Rp. 24.250.000,-	78,37%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 1.246.070.000,-	Rp. 1.165.752.000,-	93,55%
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp. 1.246.070.000,-	Rp. 1.165.752.000,-	93,55%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp. 28.370.000,-	Rp. 23.030.000,-	81,18%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp. 1.217.700.000,-	Rp. 1.142.722.000,-	93,84%
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 322.811.988,-	Rp. 190.065.390,-	58,88%
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 322.811.988,-	Rp. 190.065.390,-	58,88%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp. 322.811.988,-	Rp. 190.065.390,-	58,88%

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Patrang Tahun 2024

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Kecamatan Patrang ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Kecamatan Patrang sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Patrang disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Patrang telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari sejumlah 6 Indikator yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja 2024, sebanyak 5 indikator mencapai target dengan kategori Sangat Tinggi, dan sebanyak 1 indikator mencapai target dengan kategori tinggi.

Faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran tahun 2024 adalah :

1. kompetensi pegawai dan sarana prasarana yang mendukung meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Lingkungan yang kondusif membantu meningkatkan system penyampaian layanan;
3. Pengelolaan keuangan dan aset yang tertib, tata perundang – undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab;
4. tanggungjawab bersama dalam setiap pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran.

Rekomendasi rencana aksi yang lebih efektif untuk perbaikan kedepan sebagai berikut :

1. Menetapkan target kinerja yang tepat, spesifik dan terukur;
2. Meningkatkan manajemen perubahan untuk menciptakan budaya kerja positif,
3. Memperkuat kelembagaan, tata laksana, peraturan perundang-undangan, system manajemen SDM Aparatur, sistem pengawasan dan akuntabilitas kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Patrang yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2025.

Jember, Januari 2025  
Camat Patrang



**Hendra Kusuma, S. Sos**  
Pembina

NIP: 19730206 200312 1 002



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

## KECAMATAN PATRANG

Jl. Srikoyo No. 100 Patrang Jember Jawa Timur Kode 68111  
email. kecamatanpatrang50@gmail.com

### KEPUTUSAN CAMAT PATRANG

### KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/ 09 /02/35.09.02/2024

### TENTANG

### INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Patrang ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata kerja Kecamatan;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
  - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah;
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah;
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah.
- KELIMA** : Keputusan Camat Patrang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 01 Februari 2024

  
**CAMAT PATRANG**  
**HENDRA KUSUMA, S. Sos**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19730206 200312 1 002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN PATRANG**

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen LAKIP</li> <li>• Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK dan peta jabatan)</li> <li>• Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja</li> <li>• Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis)</li> </ul>	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Penjelasan Indikator : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik</li> <li>2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)</li> <li>3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seksi Pemerintahan</li> <li>- Seksi Pelayanan Umum</li> <li>- Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial</li> <li>- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum</li> </ul>	E - SUKMA

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesesuaian Persyaratan</li> <li>- Sistem mekanisme dan prosedur pelayanan</li> <li>- Waktu penyelesaian</li> <li>- Biaya/tarif</li> <li>- Produk spesifikasi, jenis pelayanan</li> <li>- Kompetensi pelaksana</li> <li>- Perilaku pelaksana</li> <li>- Penanganan pengaduan, saran dan Masukan</li> <li>- Kualitas sarana dan prasarana</li> </ul>		
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan	<p>Formulasi Kegiatan :            Jumlah kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi            _____ X 100%</p> <p>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/direncanakan</p> <p>Penjelasan Indikator :            Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat</p>	- Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Formulasi Perhitungan :            Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan            _____ X 100%</p> <p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk</p> <p>Penjelasan Indikator :            Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah</p>	Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	Penjelasan Indikator : 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$ Penjelasan Indikator : Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA	Sekretaris Camat	LAKIP

**CAMAT PATRANG**



**HENDRA KUSUMA, S. Sos**  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19730206 200312 1 002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER**

**Instansi** : Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

**Tugas** :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan

**Fungsi** :

- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Penanganan konflik sosial;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pemberian fasilitasi pemilihan kepala kelurahan, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- h. Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan kelurahan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipasi;
- i. Pemberian fasilitasi kerja sama kelurahan dengan pihak ketiga;

- j. Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang kelurahan, penetapan dan penegasan data kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping Kelurahan serta pelaksanaan pembangunan kawasan Kelurahan di wilayah Kecamatan;
- l. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- m. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati:

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

Indikator Tujuan 1 : Nilai SAKIP OPD

Tujuan 2 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator Tujuan 2 : Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN PATRANG**

Jl. SRIKOYO No.100 Telp. (0331) 486040 Jember

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HENDRA KUSUMA, S.Sos

Jabatan : Camat Patrang

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 26 Januari 2024

Pihak Kedua

BUPATI JEMBER,



Ir. H. HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng.

Pihak Pertama

CAMAT PATRANG



HENDRA KUSUMA, S.Sos

NIP. 19730206 200312 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN PATRANG**

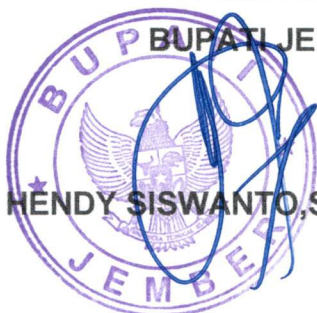
NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Indikator Program yang tercapai	100%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata Dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80
3	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	80%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai Sakip OPD	A (81)
6	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 13.102.229.372	APBD
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 2.209.547.000	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 1.246.070.000	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 322.811.988	APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 16.880.658.360</b>	

Jember, 26 Januari 2024

Pihak Kedua

**BUPATI JEMBER,**



**Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.**

Pihak Pertama

**CAMAT PATRANG**



**HENDRA KUSUMA, S.Sos**

NIP. 19730206 200312 1 002

## KERTAS KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel TC. 25 Renstra Kecamatan Patrang

### RUTIN

SASARAN RPJMD : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

INDIKATOR : NILAI SAKIP

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien		Nilai SAKIP OPD	BB (79)	BB (80)	A (81)	A (82)	A (83)
		Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	100%	100%	100%

### NON RUTIN

SASARAN RPJMD : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

INDIKATOR : Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.		Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	80%	80%	85%	85%
		Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	80%	80%	80%	85%	90%
		Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	80%	90%	100%	100%	100%

Jember, 31 Oktober 2023





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN PATRANG**

JL. SRIKOYO NO. 100 TELP. 0331-486040 JEMBER 68111

**RENCANA KINERJA TAHUN 2024**

**RPJMD**

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas	Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Tujuan OPD		Sasaran PD			Program/Kegiatan			Sub Kegiatan			Anggaran				
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan (Output)	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Meningkatkan Kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP OPD	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase realisasi anggaran	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100 orang/bulan	10.566.951.612,00				
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pertanggungjawaban Keuangan	12 laporan								
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan dan kepegawaian	12 dokumen								
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan penyediaan Barang dan jasa	12 laporan								
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 laporan					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	160.889.760,00
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	100%								

Tujuan OPD		Sasaran PD			Program/Kegiatan			Sub Kegiatan			Anggaran
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan (Output)	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kecamatan	100%	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Wilayah Kecamatan	8 dokumen	2.178.603.000,00
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	30.944.000,00
		Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan	80%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%				
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan	100%	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 lembaga kemasyarakatan	28.370.000,00
								Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 pokmas/ ormas	1.217.700.000,00
		Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketertarikan Masyarakat	100%	Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase terlaksananya koordinasi ketertarikan dan ketertiban umum di tingkat kecamatan dengan baik	100%				
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	100%	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	322.811.988,00

Tujuan OPD		Sasaran PD			Program/Kegiatan			Sub Kegiatan			Anggaran	
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan (Output)	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Meningkatnya Kualitas pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP OPD	A (81)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase realisasi anggaran	100%					
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan penyediaan Barang dan jasa	12 laporan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	327.576.300,00	
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	22.600.500,00	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	35.000.000,00	
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	77.068.800,00	
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	80 unit	40.000.000,00	
								Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Penunjang Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 unit	31.888.500,00	
		Meningkatnya Penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintahan	4 dokumen	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase realisasi anggaran	100%					

Tujuan OPD		Sasaran PD			Program/Kegiatan			Sub Kegiatan			Anggaran
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan (Output)	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4.356.000,00
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3.036.000,00
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pertanggungjawaban Keuangan	12 laporan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	141.972.000,00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.372.074.000,00

Jember, 01 Februari 2024  
CAMAT PATRANG



**HENDRA KUSUMA, S. Sos**  
NIP. 19730206 200312 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN PATRANG**

JL. SRIKOYO NO. 100 TELP. 0331-486040 JEMBER 68111

**CASCADING KECAMATAN PATRANG**

<p align="center"><b>Sasaran 1</b> Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah</p>		<p align="center"><b>Sasaran 2</b> Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan</p>		<p align="center"><b>Sasaran 3</b> Meningkatnya fasilitas kesejahteraan Masyarakat kecamatan</p>		<p align="center"><b>Sasaran 4</b> Terjaganya ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat di Kecamatan</p>		<p align="center"><b>Sasaran 5</b> Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien</p>		<p align="center"><b>Sasaran 6</b> Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan</p>	
<p align="center">Indikator Prosentase indikator program yang tercapai</p>		<p align="center">Indikator Indeks kepuasan masyarakat</p>		<p align="center">Indikator Persentase fasilitas kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan</p>		<p align="center">Indikator Persentase Tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketertarikan masyarakat</p>		<p align="center">Indikator Nilai SAKIP OPD</p>		<p align="center">Indikator Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah</p>	
<p align="center">Target 100%</p>		<p align="center">Target 80</p>		<p align="center">Target 80%</p>		<p align="center">Target 100%</p>		<p align="center">Target A (81)</p>		<p align="center">Target 4 duk</p>	
<p align="center">Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota</p>		<p align="center">Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</p>		<p align="center">Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</p>		<p align="center">Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum</p>		<p align="center">Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota</p>		<p align="center">Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota</p>	
<p align="center">Persentase realisasi anggaran</p>		<p align="center">Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan</p>		<p align="center">Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan</p>		<p align="center">Persentase terlaksananya koordinasi ketertarikan dan ketertiban umum di tingkat kecamatan dengan baik</p>		<p align="center">Persentase realisasi anggaran</p>		<p align="center">Persentase realisasi anggaran</p>	
<p align="center">Target 100%</p>		<p align="center">Target 100%</p>		<p align="center">Target 100%</p>		<p align="center">Target 100%</p>		<p align="center">Target 100%</p>		<p align="center">Target 100%</p>	
<p align="center">Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan Dan Keuangan</p>	<p align="center">Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian</p>	<p align="center">Seksi Pemerintahan</p>	<p align="center">Seksi Pelayanan Umum</p>	<p align="center">Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial</p>		<p align="center">Seksi Keterampilan dan ketertiban Umum</p>		<p align="center">Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian</p>		<p align="center">Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan Dan Keuangan</p>	<p align="center">Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian</p>
<p align="center">Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p>	<p align="center">Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p>	<p align="center">Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p>	<p align="center">Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</p>	<p align="center">Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</p>		<p align="center">Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum</p>		<p align="center">Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>		<p align="center">Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p align="center">Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>
<p align="center">Jumlah laporan Pertanggungjawaban Keuangan</p>	<p align="center">Jumlah dokumen penatausahaan dan kepegawaian</p>	<p align="center">Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p>	<p align="center">Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</p>	<p align="center">Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan</p>		<p align="center">Cakupan penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum</p>		<p align="center">Jumlah Laporan penyediaan Barang dan jasa</p>		<p align="center">Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</p>	<p align="center">Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p>
<p align="center">Target 12 Laporan</p>	<p align="center">Target 12 Dokumen</p>	<p align="center">Target 100%</p>	<p align="center">Target 100%</p>	<p align="center">Target 100%</p>		<p align="center">Target 100%</p>		<p align="center">Target 12 Laporan</p>		<p align="center">Target 3 Dokumen</p>	<p align="center">Target 12 Laporan</p>
<p align="center">Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>								<p align="center">Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>		<p align="center">Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p>	
<p align="center">Jumlah Laporan penyediaan Barang dan jasa</p>								<p align="center">Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>		<p align="center">Jumlah laporan Pertanggungjawaban Keuangan</p>	
<p align="center">Target 12 Laporan</p>								<p align="center">Target 12 Laporan</p>		<p align="center">Target 12 Laporan</p>	
<p align="center">Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>											
<p align="center">Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p>											
<p align="center">Target 12 Laporan</p>											

**DAFTAR PRESTASI/PENGHARGAAN  
TAHUN 2024  
KECAMATAN PATRANG**

No	Prestasi/Penghargaan	Level/Tingkat	Tahun	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Peserta Terbaik Paralegal Justice Award dalam kategori Penyelesaian berbagai konflik atau Permasalahan Hukum secara non Litigasi yang Dihadapi oleh Masyarakat di Wilayahnya (diberikan kepada Oko Rudi Widodo, SE, Lurah Banjarsengon)	Tingkat Nasional	2024	Penyelenggara : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama Mahkamah Agung
2	Kelurahan dengan Trend Stunting, Underweight dan Wasting Terbaik (diberikan kepada Kelurahan Jumerto)	Tingkat Kabupaten Jember	2024	Penyelenggara : TP PKK Kabupaten Jember
3	Kecamatan Dengan Kolaborasi Pentahelix Terbaik Dalam Partisipasi, Sinergi Dan Kolaborasi Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Jember Tahun 2024	Tingkat Kabupaten Jember	2024	Penyelenggara : Pemerintah Kabupaten Jember
4	Kecamatan Dengan Pemaparan Dan Penguasaan Materi Terbaik Dalam Partisipasi, Sinergi Dan Kolaborasi Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Jember Tahun 2024	Tingkat Kabupaten Jember	2024	Penyelenggara : Pemerintah Kabupaten Jember
5	Kecamatan Dengan Hasil Intervensi Serentak Terbaik Dalam Partisipasi, Sinergi Dan Kolaborasi Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Jember Tahun 2024	Tingkat Kabupaten Jember	2024	Penyelenggara : Pemerintah Kabupaten Jember

Camat Patrang



**Hendra Kusuma, S. Sos**  
NIP. 19730206 200312 1 002